



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MALIS NAINI SRI MEYYANTI**
2. Jabatan : **KEPALA GRUP**
3. NHK : **271760**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.125.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 567 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000		
2. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000		
3. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. Bangunan Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	514.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOBIL, MERCEDES BENZ MINIBUS Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
3. MOBIL, MERCEDEZ GLC 250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	117.008.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	3.998.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.680.623.911
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.966.600.000
Sub Total	Rp.	16.401.231.911



III. HUTANG

Rp. 3.086.657.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 13.314.574.511

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.